PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
ISBN: 978-623-7496-01-4

Penguatan peran dan fungsi komite sekolah SD di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Fajar[1], Abdul Halik[2], Kamaruddin Hasan[3]
[1,2,3]Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar

Abstract. Partnership Program Partnership (PKM) is the management of elementary school committee in Tanete Rilau Sub-district. The problem is: (1) the process of forming and / or selecting the School Committee management which is not fully in accordance with the General Guidelines for the Board of Education and School Committee, namely the appointment model by the school principal, (2) the still low understanding of the position, role and function of the School Committee, (3) the HR capacity of the SD School Committee in Tanete Rilau District is still low. The method used to overcome the above problem by carrying out the main workshop to the Management of Elementary School Committees in Tanete Rilau District, Barru District, aims to: (1) Provide understanding to members of the Primary School Committee in Tanete Rilau District about the General Guidelines for the Board of Education and Committee Schools (2) increase the knowledge / understanding of School Committee administrators positions, roles and functions of School Committees, (3) help improve the HR Quality of SD School Committee members in Tanete Rilau District.

Keywords: effectiveness, school committee,education quality services

I. PENDAHULUAN

Sekolah sebagai institusi atau lembaga pendidikan, merupakan wadah proses pelaksanaan pendidikan, ia memiliki sistem yang dinamis, dan merupakan institusi yang komplek. Dalam aktifitasnya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar sarana berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam suatu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan serius. Lebih dari itu kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya mampu memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa.

Pembentukan komite sekolah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokrasi. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra sekolah yang dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dalam program pendidikan disekolah. Tugas dan fungsi komite sekolah antara lain mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisispasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, dan menggalang masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Seiring dinamika dalam dunia pendidikan, lahirlah UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah/Madrasah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan kembali ditegaskan pada pasal 56 ayat 1-4. Pasal 56 ayat (1): Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Pasal 56 ayat (2): Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Pasal 56 ayat (3): Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pasal 56 ayat (4): Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi amanat UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat (4)tersebut, pada 28 Januari 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Berikutnya pada 28 September 2010 diterbitkan PP Nomor 66 Tahun 2010 yang merupakan penyempurnaan PP Nomor 17 tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan secara rinci berbagai aspek yang berkaitan dengan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah, termasuk eksistensi, operasional, dan legalitas.

Penyelenggaraan pendidikan menjadi tugas bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Paradigma sosiologis mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem sosial,hubungan sekolah dan masyarakat adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, maju dan berkembangnya sekolah juga tergantung pada perkembangan masyarakat bahkan sekolah menjadi cermin keberadaan lingkungan masyarakat sekitar. Masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan, yang meliputi perencana-an, pengawasan, dan monitoring program pendidikan. Peran dan partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa pelibatan dalam komite sekolah.

II. METODE YANG DIGUNAKAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah diurai-kan, maka pengabdian kepada masyarakat ini menawar-kan solusi berupa "*Workshop Penguatan Peran Dan Fungsi Komite Sekolah Sd Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*".

Kecamatan Tanete Rilau yang terletak 89,2 km sebelah utara Kota Makassar mempunyai 38 Sekolah Dasar yang tersebar di 8 Desa dan 2 Kelurahan, salah satu Sekolah yang dijadikan mitra kegiatan ini adalah SD Lompengeng Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Adapun rincian data GTK SDI Lompengeng adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Data GTK SDI Lompengeng

Kepsek	1 Orang
Guru Kelas	7 Orang
Guru Agama	1 Orang
Guru Penjaskes	1 Orang
Operator	1 Orang
Pegawai Perpustakaan	1 Orang
Total	**12 Orang**

Tabel 2. Jumlah pengurus komite

Ketua	1 Orang
Sekertaris	1 Orang
Bendahara	1 Orang
Anggota	8 Orang
Guru	12 Orang
Total	**23 Orang**

Tabel 3. Data prasarana

Ruang Kepsek	1 Unit
Laboratorium	1 Unit
Perpustakaan	1 Unit
Ruang Guru	1 Unit
Rumah Guru	1 Unit
Mushallah	1 Unit
WC	6 Unit
Total	**12 Unit**

Tabel 4. Jumlah siswa

Laki-Laki	63 Orang
Perempuan	75 Orang
Total	**138 Orang**

Karena keterbasan waktu dan dana serta hasil observasi, maka perserta *workshop* ini hanya diambil dari Pengurus Kiomite Kepala Sekolah dan guru SD Lompengeng Kecamatan Tanete Rilau yang berjumlah 12 orang.

Gambar 1. Penyampaian materi workshop

Pengambilan data awal terhadap kelompok mitra adalah pemberian angket kepada seluruh guru peserta worksop. Angket berisi tetntang bio data serta pertanya-an tentang kebutuhan apa yang paling mendesak untuk diberikan kepada guru-guru SD khususnya guru pada sekolah mitra. Data yang telah dikumpulkan ditindak-lanjuti dengan melakukan pembelajaran (tatap muka) kepada seluruh peserta sebanyak 5 kali pertemuan (100 menit) dengan rencana kegiatan:

1. Pertemuan 1: Pembukaan dilanjutkan dengan pem-berian materi tentang buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
2. Pertemuan 2: Lanjutan pembahasaan buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
3. Pertemuan 3: Materi tentang kedudukan, peran, dan fungsi Komite Sekolah.
4. Pertemuan 4: Lanjutan pengajaran tentang keduduk-an, peran, dan fungsi Komite Sekolah.
5. Pertemuan 5: Pembahasan Modul Peningkatkan Kualitas SDM anggota Komite Sekolah SD di Kecamatan Tanete Rilau.

6. Pertemuan lainya: dilakukan di rumah masing-masing menyelesaikan tugas pembuatan Modul Peningkatan Kualitas SDM anggota Komite Sekolah SD Di Kecamatan Tanete Rilau.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini berupa pembelajaran di kelas (ceramah, tanya jawab, membuat perangkat pembelajaran dan mengerjakan soal) Pemateri pertama memberikan penguatan tentang buku panduan Umum Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah serta pemberian tugas kepada masing-masing peserta sesuai jenjang kelas yang diajarkan.

Dalam proses pembelajaran tentang Panduan umum dewan pendidikan dan komite Sekolah. Sangat ditekankan tentang penguasaan konsep dasar serta berbagai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh guru pada saat proese belajar mengajar di kelas. Selanjutnya pengerjaan soal-soal dari materi yang diberikan, diawali dengan soal yang sangat mudah sampai dengan soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang tinggi. Peserta diberikan beberapa trik mengerjakan soal-soal selanjutnya diberikan soal-soal untuk dikerjakan di rumah masing-masing.

III. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan guna menjawab tiga persoalan besar yang dihadapai pengurus komite sekolah Sekolah SD di Kecamatan Tanete Rilau. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah; 1) Penguatan pemahaman kepada anggota Komite Sekolah SD di Kecamatan Tanete Rilau tentang buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 2) Penguatan pemahaman tentang Pengurus komite Sekolah kedudukan, peran, dan fungsi Komite Sekolah, 3) membantu meningkatkan Kualitas SDM anggota Komite Sekolah SD di Kecamatan Tanete Rilau.

Berdasarkan kesepakatan dengan pengurus Komite dan Kepala Sekolah maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setiap hari Senin mulai pukul 14.30 sampai 17.00. Hal itu dilakukan untuk menghindari terganggunya proses belajar mengajar pada pagi hari. Waktu pelaksanaan dimulai pada tgl 11 Agustus 2019 sampai 4 September 2019.

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari *output* dari peserta berupa meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Adapun hasil evaluasi proses yang dicapai oleh peserta diperoleh dengan memberikan angket/kuesioner kepada peserta yang berisi tentang pernyataan seputar pelaksanaan *workshop*, berupa kepuasan terhadap materi, pemandu dan fasilitas pembelajaran. Rekapitulasi hasil proses kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Evaluasi Kegiatan

Unsur yang dinilai	Buruk Sekali (%)	Buruk (%)	Cukup (%)	Baik (%)	Baik Sekali (%)
Materi	0	0	8	5	87
Waktu	0	0	15	20	65
Instruktur	0	0	5	15	80
Fasilitas	0	0	10	20	70
Kesesuaian	0	0	0	10	90

Tabel 5 menunjukkan bahwa umumnya peserta mengangap baik sekali kegiatan ini (materi = 87% dan kesesuaian = 90%), Artinya program ini sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam rangka meng-*update* pengetahuan yang dimiliki, serta memperbaiki kesalahan-kesalahn yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas selama ini. Kepuasan peserta terhadap pemateri/instruktur juga terbukti dari keseriusan dan respon yang diberikan pada saat proses pembelajaran dan pembagian tugas. Data di atas juga menunjukkan bahwa tidak ada peserta yang memberikan penilaian buruk atau buruk sekali terhadap pelaksanan kegiatan ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, baik *output* yang diperoleh maupun evaluasi proses disimpulkan bahwa kegiatan seperti ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh pengurus Komite Sekolah SD Kecamatan Tanete Rilau. Dalam rangka kesinambungan kegiatan ini juga diperlukan dalam bentuk pembimbingan secara berkelanjutan sehingga proses pelaksanan kegiatan belajar mengajar di SD lebih berkualitas, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekolah dasar khususnya di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UNM atas arahan dan pembinaanya selama proses kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan Pemerintah Kabupaten Barru, khususnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, yang telah memberi fasilitas, melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan PKM hingga selesai.